RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

SEKRETARIAT DPRD

JL.KH Wachid Hasyim No .110 Telp (0321) 866024 – 866028

JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Dokumen Renja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 guna mendukung perencanaan tahunan daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Jombang Tahun 2024.

Proses perencanaan pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan pemerintah Kabupaten Jombang yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang memuat tujuan, sasaran, perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menjadi landasan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD dalam mengemban Amanah pembangunan di Kabupaten Jombang.

Hal - hal yang berkenan dengan Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Jombang kami tuangkan dalam bentuk Rencana Kinerja, penjabarannya kami berpedoman pada Rencana Kegiatan Tahun 2024 dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024, sedangkan kegiatan kegiatan rutin yang melekat dalam tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD kami laksanakan guna menunjang program,kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk pelayanan publik.

Harapan kami kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, dalam melaksnakan tugas-tuganya berpedoman pada Rencana Kerja yang telah dibuat sehingga dapat berjalan lancar, terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2024 yang kami susun, semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jombang, 10 Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

Drs. BAMBANG SRIYADI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 6
1.2. Landasan hukum 9
1.3. Maksud dan tujuan 11
1.4. Sistematika Rancangan Renja 11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD 12
2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD 19
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD . 20
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 24
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi 36
3.2. Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD 37
3.3. Program dan kegiatan 37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 44
BAB V PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Dprd Tahun 2022 kabupaten Jombang …… 14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 20

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 25

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Jombang 32

Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 2024
dan prakiraan maju tahun 2025 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 227, telah mengamanatkan untuk

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap 3 (Tiga) tahun.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja DPRD Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan sebagaiamana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
3. Merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja DPRD Kabupaten Jombang.

Mengingat arti penting dari Renja, maka penyusunannya diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD yang dalam hal ini Rencana Kerja DPRD Kabupaten Jombang, penyusunan tersebut harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa dan Kecamatan mencakup 5 (lima) pendekatan, yakni:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Botom–Up (Bawah–Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang

Penyusunan Renja OPD DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2024 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dengan tema/arah pembangunan daerah tahun 2024 yang harus dapat diwujudkan adalah “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
20. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 050/1034/415.01/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Rencana Kerja PD Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4 SISTEMATIKA RANCANGAN RENJA

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah “Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah:

“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional”.

Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan ke dalam 2 program dan 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada tahun 2022. Adapun capaian penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 adalah 45%. Sedangkan realisasi kinerja untuk semua program/kegiatan dan sub kegiatan tercapai 50 %. Beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2022 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2022 sampai dengan tri bulan 2 dan tentunya kebijakan / rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan ; nihil
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan ; nihil
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ; nihil
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ; kinerja semua program,kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
5. lmplikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
   - Meningkatkan kualitas perencanaan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
   - Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu;
   - Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2022
   - Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Sekretariat DPRD.
   - Optimalisasi pendayagunaan sumberdaya dan penyusunan program / kegiatan
   - / sub kegiatan.
   - Melakukan koordinasi secara intensif dengan provinsi dan OPD terkaiit update kebijakan secara terus - menerus

Realisasi Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022 adalah 88,11% Adapun beberapa pencapaian kinerja program/ kegiatan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target di rencana strategis sebesar 100%, realisasi program ini terdiri dari Realisasi target sebesar 100% serta realisasi target anggaran sebesar Rp. 47.786.046.336,00 dengan realisasi Rp. 45.461.264.756,00 (95,14%) .
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target di rencana strategis IKM = 85,68 dan IPP = 3,10, realisasi program ini terdiri dari Realisasi target sebesar IKM = 88,20 dan IPP = 2,63 serta realisasi target anggaran sebesar Rp. 26.555.861.928,00 dengan realisasi Rp. 22.063.202.204,00 (83,08%)

Selanjutnya untuk lebih jelasnya pada tabel 2.1

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun (n-2)2021			Target Program & Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun (n-1)2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Sekretariat DPRD Tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)/2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun (n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	***PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR***	***500 %***	**n/a**	***100 %***	***100 %***	***100***	***100 %***	***100 %***	***100***
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	***Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai***	***500 %***	**n/a**	***100 %***	***100 %***	***100***	***100 %***	***100 %***	***100***
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*15 dokumen*	n/a	*3 dokumen*	*3 dokumen*	*100*	*3 dokumen*	*3 dokumen*	*100*
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	*Jumlah Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun*	*60 Laporan*	n/a	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*

				ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan***	***500 %***	**n/a**	***100 %***	***10 0 %***	***10 0***	***100 %***	***100 %***	***100***
				Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	*155 Orang*	n/a	*Orang*	*31 Orang*	*10 0*	*31 Orang*	*31 Orang*	*100*
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	*Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	*24 bln*	n/a	*12 bln*	*12 bln*	*10 0*	*12 bln*	*12 bln*	*100*
				Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	***Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***200 %***	**n/a**	***100 %***	***10 0 %***	***10 0***	***100 %***	***100 %***	***100***
				Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	*Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan*	*200 orang*	n/a	*50 orang*	*50 orang*	*10 0*	*50 orang*	*50 orang*	*100*
				Administrasi umum perangkat daerah	***Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah***	***200 %***	**n/a**	***100 %***	***10 0 %***	***10 0***	***100 %***	***100 %***	***100***
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	*Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia*	*100 jenis*	n/a	*20 jenis*	*20 jenis*	*10 0*	*20 jenis*	*20 jenis*	*100*
				Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	*Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi*	*105 jenis*	n/a	*21 jenis*	*21 jenis*	*10 0*	*21 jenis*	*21 jenis*	*100*
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi*	*85 jenis*	n/a	*17 jenis*	*17 jenis*	*10 0*	*17 jenis*	*17 jenis*	*100*
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*5 paket*	n/a	*1 paket*	*1 paket*	*10 0*	*1 paket*	*1 paket*	*100*
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Pemenuhan barang Cetakan yang terfasilitasi*	*50 jenis*	n/a	*10 jenis*	*10 jenis*	*10 0*	*10 jenis*	*10 jenis*	*100*
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*50 paket*	n/a	*10 paket*	*10 paket*	*10 0*	*10 paket*	*10 paket*	*100*
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*60 laporan*	n/a	*12 laporan*	*12 laporan*	*10 0*	*12 laporan*	*12 laporan*	*100*

				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*60*	*laporan*	n/a	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*100*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*100*
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***500***	***%***	**n/a**	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi*	*10*	*Jenis*	n/a	*2*	*Jenis*	*2*	*Jenis*	*100*	*2*	*Jenis*	*2*	*Jenis*	*100*
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*240*	*laporan*	n/a	*48*	*laporan*	*48*	*laporan*	*100*	*48*	*laporan*	*48*	*laporan*	*100*
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*300*	*laporan*	n/a	*60*	*laporan*	*60*	*laporan*	*100*	*60*	*laporan*	*60*	*laporan*	*100*
				Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	***Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***500***	***%***	**n/a**	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*25*	*Unit*	n/a	*5*	*Unit*	*5*	*Unit*	*100*	*5*	*Unit*	*5*	*Unit*	*100*
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*195*	*unit*	n/a	*39*	*unit*	*39*	*unit*	*100*	*39*	*unit*	*39*	*unit*	*100*
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	*Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan*	*5*	*unit*	n/a	*1*	*unit*	*1*	*unit*	*100*	*20*	*unit*	*20*	*unit*	*100*
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan***	***500***	***%***	**n/a**	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD*	*250*	*Orang/ Bulan*	n/a	*50*	*Orang/ Bulan*	*50*	*Orang/ Bulan*	*100*	*50*	*Orang/ Bulan*	*50*	*Orang/ Bulan*	*100*

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*15*	*Paket*	n/a	*3*	*Paket*	*3*	*Paket*	*100*	*3*	*Paket*	*3*	*Paket*	*100*
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*250*	*Orang*	n/a	*50*	*Orang*	*50*	*Orang*	*100*	*50*	*Orang*	*50*	*Orang*	*100*
				Layanan Administrasi DPRD	***Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan***	***500***	***%***	***n/a***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi*	*60*	*laporan*	*n/a*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*100*	*12*	*laporan*	*12*	*laporan*	*100*
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	***1.IKM***	***8,31***	***Indeks***	**n/a**	***8,31***	***Indeks***	***8,31***	***Indeks***	***100***	***8,31***	***Indeks***	***8,31***	***Indeks***	***100***
					2. IPP	***3,00***	***Indeks***	**n/a**	***3,00***	***Indeks***	***3,00***	***Indeks***	***100***	***3,00***	***Indeks***	***3,00***	***Indeks***	***100***
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	***1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan***	***15***	***Dokumen***	***n/a***	***3***	***Dokumen***	***3***	***Dokumen***	***100***	***3***	***Dokumen***	***3***	***Dokumen***	***100***
					2.Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	***110***	***Dokumen***	***n/a***	***22***	***Dokumen***	***22***	***Dokumen***	***100***	***22***	***Dokumen***	***22***	***Dokumen***	***100***
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*10*	*Dokumen*	*n/a*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*100*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*100*
				Pembahasan Rancangan Perda	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*45*	*Dokumen*	*n/a*	*9*	*Dokumen*	*9*	*Dokumen*	*100*	*9*	*Dokumen*	*9*	*Dokumen*	*100*
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	*225*	*Dokumen*	*n/a*	*25*	*Dokumen*	*25*	*Dokumen*	*100*	*25*	*Dokumen*	*25*	*Dokumen*	*100*
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*20*	*Dokumen*	*n/a*	*4*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*100*	*4*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*100*
				Peningkatan Kapasitas DPRD	***Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi***	***1666***	***Layanan***	***n/a***	***366***	***Layanan***	***366***	***Layanan***	***100***	***366***	***Layanan***	***366***	***Layanan***	***100***

				Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*30*	*Dokumen*	*n/a*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*100*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*100*
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*60*	*Dokumen*	*n/a*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*100*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*100*
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan*	*20*	*orang*	*n/a*	*4*	*orang*	*4*	*orang*	*100*	*4*	*orang*	*4*	*orang*	*100*
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*40*	*Orang*	*n/a*	*8*	*Orang*	*8*	*Orang*	*100*	*8*	*Orang*	*8*	*Orang*	*100*
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*50*	*Dokumen*	*n/a*	*10*	*Dokumen*	*10*	*Dokumen*	*100*	*10*	*Dokumen*	*10*	*Dokumen*	*100*
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	***Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi***	***500***	***%***	***n/a***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*5*	*laporan*	*n/a*	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	*100*	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	*100*
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun*	*10*	*Dokumen*	*n/a*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*100*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*100*
				Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*750*	*Dokumen*	*n/a*	*150*	*Dokumen*	*15*	*Dokumen*	*100*	*150*	*Dokumen*	*150*	*Dokumen*	*100*
				Fasilitasi Tugas DPRD	***Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi***	***500***	***%***	***n/a***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***	***100***	***%***	***100***	***%***	***100***
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*60*	*Dokumen*	*n/a*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*100*	*12*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*100*
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*20*	*Dokumen*	*n/a*	*4*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*100*	*4*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*100*

2.2 Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat DPRD merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan DPRD, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Sekretariat DPRD adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

Sampai dengan periode tribulan IV tahun 2022 Sekretariat DPRD menyusun 3 dokumen perencanaan yaitu dokumen renja 2023, Perubahan Renja 2022 dan Perubahan Renstra 2018-2023. Pengendalian dan Evaluasi Program sebanyak 5 Laporan yaitu Laporan LKJiP 2022, monitoring capaian kinerja dan anggaran tribulan 1,2,3 dan 4

2. Capaian Peningkatan Pelayanan daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Sekretariat DPRD menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dengan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN JOMBANG

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Evaluasi AKIP	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Baik	Sangat baik	Sangat Baik	Proses	
		BB	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	Proses	
2	Nilai Indeks kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Berkualitas	Berkualitas	Berkualitas	Baik	Berkualitas	Berkualitas	proses	
		76.61	78.75	-	-	-	81.93	-	-	-	
		-	-	7.15	7.384	7.50	-	7.80	7.04	proses	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Sekretariat DPRD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dari rata-rata target/ sasaran sebesar 88,11% selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang diharapkan dapat terealisasi capaian maksimal 90% baik dari sisi kinerja output/ hasil maupun kinerja anggaran. Namun selama tahun 2023 realisasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa Penyerapan yang ***rendah.***

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadahi. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi

Keys of Development Goals bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, Keys of Development Goals di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan di Sekretariat DPRD.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain :

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan Pelayanan DPRD.
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan DPRD;
3. Tata kelola di Sekretariat kurang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta penyelenggaraan pelayanan publik yang belum maksimal.

4. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih secara manual dan kurang efisien
5. Kurangnya inovasi dalam pelayanan di Sekretariat DPRD

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, terdiri atas :

- Faktor Kekuatan Organisasi
    1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2021 tentang kedudukan ,Susunan Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
    2. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, siap untuk mendukung pengelolaan program di Sekretariat DPRD.
    3. Koordinasi antara Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Kemendagri, dan Kemenkeu.
- Faktor Kelemahan Organisasi
    1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang belum mengakomodasi secara optimal pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    2. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
    3. Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.
    4. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta belum tercukupinya SDM yang kompeten dalam pelaksananan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada di luar lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah :

- Faktor Peluang Organisasi
    1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth)
    2. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.
- Faktor Tantangan Organisasi
    1. Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha / swasta.
    2. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-4 periodesasi 2005-2025 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan aparatur yang cerdas, terampil, bertangggungjawab, inovatif dan kapabel.

Hal tersebut berarti aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean goverment dan good governance.

Sekretariat DPRD mempunyai peran penting dalam proses pembangunan mendukung keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi dan politik di Sekretariat DPRD membutuhkan sinergitas antar seluruh SKPD, disebabkan terbatasnya anggaran dengan kebutuhan pembangunan yang cukup banyak. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kebijaksanaan dalam melihat secara komprehensif demi peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

.Tabel 2.3. *Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024*

no	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Kab. Jombang**	**PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**100%**	**47.124.125.064**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kab. Jombang**	**PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR**	**100%**	**47.124.125.064**	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	**Kab. Jombang**	**Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai**	**100%**	**40.250.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**Kab. Jombang**	**Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai**	**100%**	**40.250.000**	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 dokumen*	25.700.000	*Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 dokumen*	25.700.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang*	*12 laporan*	14.550.000	*Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun*	*12 laporan*	14.550.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Jombang**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai**	**100%**	**7.528.486.122**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Jombang**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan**	**100%**	**7.528.486.122**	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	*Kab. Jombang*	*Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	*31 orang*	7.212.226.122	*Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	*31 orang*	7.212.226.122	

	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	*12 bulan*	316.260.000	*Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	*12 bulan*	316.260.000	
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian***	***100%***	**486.050.000**	***Administrasi Kepegawaian perangkat daerah***	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***100%***	**486.050.000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-*	*50 orang*	486.050.000	*Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan*	*Kab. Jombang*	*Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan*	*50 orang*	486.050.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi***	***100%***	**2.278.914.075**	***Administrasi umum perangkat daerah***	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah***	***100%***	**2.278.914.075**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	*20 jenis*	26.144.900	*Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	*Kab. Jombang*	*Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia*	*20 jenis*	26.144.900	
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang*	*21 jenis*	159.674.725	*Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi*	*21 jenis*	159.674.725	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kab.Jombang*	*Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang*	*17 jenis*	21.929.750	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi*	*17 jenis*	21.929.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 paket*	116.732.000	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 paket*	116.732.000	
	Penyediaan Barang	*Kab.Jombang*	*Jumlah Pemenuhan*	*10 paket*	32.416.700	*Penyediaan Barang*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Pemenuhan barang*	*10 paket*	32.416.700	

	Cetakan dan Penggandaan		*barang Cetakan yang terfasilitasi*			*Cetakan dan Penggandaan*		*Cetakan yang terfasilitasi*			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*10 dokumen*	75.264.000	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*10 dokumen*	75.264.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 laporan*	94.500.000	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 laporan*	94.500.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi*	*12 laporan*	1.752.252.000	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	*12 laporan*	1.752.252.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan***	***100***	**823.167.405**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Jombang***	***Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100***	**823.167.405**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kab. Jombang*	*Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi*	*2 jenis*	3.500.000	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Jombang*	*Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi*	*2 jenis*	3.500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	*Kab.Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*48 laporan*	271.009.980	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*48 laporan*	271.009.980	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*60 laporan*	548.657.425	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*60 laporan*	548.657.425	
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan***	***100%***	**980.093.570**	***Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***100%***	**980.093.570**	

			daerah								
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan*	*5 unit*	232.510.000	*Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*5 unit*	232.510.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*39 unit*	561.340.000	*Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan*	*39 unit*	561.340.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab.Jombang*	*Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung*	*1 unit*	186.243.570	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*1 unit*	186.243.570	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan***	***100%***	**34.661.708.892**	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan***	***100%***	**34.661.708.892**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD*	*50 orang*	34.507.087.092	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	*Kab.Jombang*	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD*	*50 orang*	34.507.087.092	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*3 paket*	111.250.000	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*3 paket*	111.250.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*50 orang*	43.371.800	*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*50 orang*	43.371.800	
	Layanan Administrasi DPRD	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Administrasi DPRD***	***100%***	**325.455.000**	***Layanan Administrasi DPRD***	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Administrasi DPRD yang***	***100%***	**325.455.000**	

			Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					*Naskah Akademik yang Difasilitasi*			
	Peningkatan Kapasitas DPRD	***Kab. Jombang***	***Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD***	***366 layanan***	**4.535.565.500**	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	***Kab. Jombang***	***Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi***	***366 layanan***	**4.535.565.500**	
	Pendalaman Tugas DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6 dokumen*	3.496.078.000	*Pendalaman Tugas DPRD*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6 dokumen*	3.496.078.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi*	*12 dokumen*	367.500.000	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*12 dokumen*	367.500.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan*	*4 orang*	360.000.000	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan*	*4 orang*	360.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Kab.Jombang*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*8 orang*	288.000.000	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*8 orang*	288.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan*	*10 dokumen*	23.987.500	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*10 dokumen*	23.987.500	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	***Kab.Jombang***	***Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi***	***100%***	**616.568.000**	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	***Kab.Jombang***	***Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi***	***100%***	**616.568.000**	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Kab.Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*1 laporan*	77.298.000	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*1 laporan*	77.298.000	

	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun*	*2 dokumen*	67.670.000	*Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD*	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun*	*2 dokumen*	67.670.000	
	Pelaksanaan Reses	*Kab.Jombang*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*150 dokumen*	471.600.000	*Pelaksanaan Reses*	*Kab.Jombang*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*150 dokumen*	471.600.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	***Kab.Jombang***	***Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi***	***100%***	**18.549.727.000**	***Fasilitasi Tugas DPRD***	***Kab.Jombang***	***Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi***	***100%***	**18.549.727.000**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas*	*12 Dokumen*	16.510.467.000	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*12 Dokumen*	16.510.467.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*4 dokumen*	2.039.260.000	*Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*4 dokumen*	2.039.260.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di daerah. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang berkaitan dengan :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Renstra.
2. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.

3. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan sinergitas Sekretariat DPRD

4. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada RKPD Kab. Jombang Tahun 2024, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Jombang

No	Program/keg/sub keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	***Kab. Jombang***	***PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR***	***100%***	**47.124.125.064**	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD***	***100%***	**40.250.000**	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3 dokumen*	25.700.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun*	*12 laporan*	14.550.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Kab. Jombang***	***Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan***	***100%***	**7.528.486.122**	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	*Kab. Jombang*	*Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	*31 orang*	7.212.226.122	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	*12 bulan*	316.260.000	
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat***	***100%***	**486.050.000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	*Kab. Jombang*	*Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan*	*50 orang*	486.050.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah***	***100%***	**2.278.914.075**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang*	*20 jenis*	26.144.900	
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor*	*21 jenis*	159.674.725	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kab.Jombang*	*Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi*	*17 jenis*	21.929.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 paket*	116.732.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kab.Jombang*	*Jumlah Pemenuhan barang Cetakan yang terfasilitasi*	*10 paket*	32.416.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*10 dokumen*	75.264.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 laporan*	94.500.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 laporan*	1.752.252.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100***	**823.167.405**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kab. Jombang*	*Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi*	*2 jenis*	3.500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	*Kab.Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*48 laporan*	271.009.980	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	*Kab. Jombang*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*60 laporan*	548.657.425	
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	***Kab. Jombang***	***Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan***	***100%***	**980.093.570**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*5 unit*	232.510.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan*	*39 unit*	561.340.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab.Jombang*	*Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*1 unit*	186.243.570	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	***100%***	**34.661.708.892**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	*Kab.Jombang*	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD*	*50 orang*	34.507.087.092	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*3 paket*	111.250.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	*50 orang*	43.371.800	
	Layanan Administrasi DPRD	***Kab.Jombang***	***Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan***	***100%***	**325.455.000**	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*12 laporan*	325.455.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	***Kab.Jombang***	***1.IKM***	***8,31 indeks***	**24.017.320.500**	
		Kab.Jombang	***2. IPP***	***3,00 indeks***		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	***Kab.Jombang***	***1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan***	***3 dokumen***	**315.460.000**	
		Kab.Jombang	***2.Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan***	***22 dokumen***		

	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*2 dokumen*	6.100.000	
	Pembahasan Rancangan Perda	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*9 dokumen*	51.160.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	*25 dokumen*	34.200.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*4 dokumen*	224.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	***Kab. Jombang***	***Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi***	***366 layanan***	**4.535.565.500**	
	Pendalaman Tugas DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	*6 dokumen*	3.496.078.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi*	*12 dokumen*	367.500.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Kab.Jombang*	*Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan*	*4 orang*	360.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Kab.Jombang*	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*8 orang*	288.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*10 dokumen*	23.987.500	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	***Kab.Jombang***	***Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi***	***100%***	**616.568.000**	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Kab.Jombang*	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*1 laporan*	77.298.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Kab.Jombang*	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun*	*2 dokumen*	67.670.000	
	Pelaksanaan Reses	*Kab.Jombang*	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*150 dokumen*	471.600.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	***Kab.Jombang***	***Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi***	***100%***	**18.549.727.000**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*12 Dokumen*	16.510.467.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Kab. Jombang*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*4 dokumen*	2.039.260.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana RPJPD, RPD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema , **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusi"** yang dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional (PN):

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana kerja Daerah harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah oleh karena itu tema/ arah pembangunan daerah tahun 2024 adalah “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul” yang dijabarkan dalam 3 prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat, Keamanan dan Ketentraman Umum
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Membangun SDM yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Inovatif serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 dimana merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2024 terdapat 3 (empat) prioritas pembangunan, dengan tema/arah pembangunan daerah pada tahun 2024 yaitu **"Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul"**.

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja tahun 2024 adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat DPRD.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran OPD Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap terhadap Tugas dan Fungsi DPRD, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Tujuan Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang diarahkan untuk mencapai Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik dengan sasaran RPD adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” yang selaras dengan tujuan OPD yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi”

2. Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Program dan kegiatan yang dirancang pada Renja 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitasi dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal

merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merencanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan	Prakiraan Maju 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	***PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR***	***Kab. Jombang***	***100%***	**47.124.125.064**	APBD		***100%***	**47.124.125.064**
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	***Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai***	***Kab. Jombang***	***100%***	**40.250.000**	APBD		***100%***	**40.250.000**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab. Jombang*	*3 dokumen*	25.700.000	APBD		*3 dokumen*	25.700.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun*	*Kab. Jombang*	*12 laporan*	14.550.000	APBD		*12 laporan*	14.550.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan***	***Kab. Jombang***	***100%***	**7.528.486.122**	APBD		***100%***	**7.528.486.122**
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Jombang*	*31 orang*	7.212.226.122	APBD		*31 orang*	7.212.226.122
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	*Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	*Kab. Jombang*	*12 bulan*	316.260.000	APBD		*12 bulan*	316.260.000
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	***Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***Kab. Jombang***	***100%***	**486.050.000**	APBD		***100%***	**486.050.000**
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	*Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-*	*Kab. Jombang*	*50 orang*	486.050.000	APBD		*50 orang*	486.050.000
	Administrasi umum perangkat daerah	***Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah***	***Kab. Jombang***	***100%***	**2.278.914.075**	APBD		***100%***	**2.278.914.075**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	*Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan*	*Kab. Jombang*	*20 jenis*	26.144.900	APBD		*20 jenis*	26.144.900
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	*Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi*	*Kab. Jombang*	*21 jenis*	159.674.725	APBD		*21 jenis*	159.674.725
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Kab.Jombang*	*17 jenis*	21.929.750	APBD		*17 jenis*	21.929.750
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Kab.Jombang*	*1 paket*	116.732.000	APBD		*1 paket*	116.732.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Kab.Jombang*	*10 paket*	32.416.700	APBD		*10 paket*	32.416.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	*JumlahDokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan*	*Kab.Jombang*	*10 dokumen*	75.264.000	APBD		*10 dokumen*	75.264.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kab. Jombang*	*12 laporan*	94.500.000	APBD		*12 laporan*	94.500.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Jombang*	*12 laporan*	1.752.252.000	APBD		*12 laporan*	1.752.252.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Jombang***	***100%***	**823.167.405**	APBD		***100***	**823.167.405**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi*	*Kab. Jombang*	*2 jenis*	3.500.000	APBD		*2 jenis*	3.500.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Kab.Jombang*	*48 laporan*	271.009.980	APBD		*48 laporan*	271.009.980
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Kab. Jombang*	*60 laporan*	548.657.425	APBD		*60 laporan*	548.657.425
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	***Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Kab. Jombang***	***100%***	**980.093.570**	APBD		***100%***	**980.093.570**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Kab.Jombang*	*5 unit*	232.510.000	APBD		*5 unit*	232.510.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Kab.Jombang*	*39 unit*	561.340.000	APBD		*39 unit*	561.340.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab.Jombang*	*1 unit*	186.243.570	APBD		*1 unit*	186.243.570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	***Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan***	***Kab.Jombang***	***100%***	**34.661.708.892**	APBD		***100%***	**34.661.708.892**
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD*	*Kab.Jombang*	*50 orang*	34.507.087.092	APBD		*50 orang*	34.507.087.092
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	*Kab.Jombang*	*3 paket*	111.250.000	APBD		*3 paket*	111.250.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up*	*Kab.Jombang*	*50 orang*	43.371.800	APBD		*50 orang*	43.371.800
		DPRD							
	Layanan Administrasi DPRD	***Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan***	***Kab.Jombang***	***100%***	**325.455.000**	APBD		***100%***	**325.455.000**
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	*Kab.Jombang*	*12 laporan*	325.455.000	APBD		*12 laporan*	325.455.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	***1.IKM***	***Kab.Jombang***	***8,31 indeks***	**24.017.320.500**	APBD		***8,31 indeks***	**24.017.320.500**
		2. IPP	***Kab.Jombang***	***3,00 indeks***		APBD		***3,00 indeks***	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	***1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan***	***Kab.Jombang***	***3 dokumen***	**315.460.000**	APBD		***3 dokumen***	**315.460.000**
		2.Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	***Kab.Jombang***	***22 dokumen***		APBD		***22 dokumen***	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	*Kab. Jombang*	*2 dokumen*	6.100.000	APBD		*2 dokumen*	6.100.000
	Pembahasan Rancangan Perda	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	*Kab. Jombang*	*9 dokumen*	51.160.000	APBD		*9 dokumen*	51.160.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*	*Kab.Jombang*	*25 dokumen*	34.200.000	APBD		*25 dokumen*	34.200.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	*Kab. Jombang*	*4 dokumen*	224.000.000	APBD		*4 dokumen*	224.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kapasitas DPRD	***Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi***	***Kab. Jombang***	***366 layanan***	**4.535.565.500**	APBD		***366 layanan***	**4.535.565.500**
	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman*	*Kab.Jombang*	*6 dokumen*	3.496.078.000	APBD		*6 dokumen*	3.496.078.000
		Tugas DPRD							
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	*Kab.Jombang*	*12 dokumen*	367.500.000	APBD		*12 dokumen*	367.500.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan*	*Kab.Jombang*	*4 orang*	360.000.000	APBD		*4 orang*	360.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	*Kab.Jombang*	*8 orang*	288.000.000	APBD		*8 orang*	288.000.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	*Kab.Jombang*	*10 dokumen*	23.987.500	APBD		*10 dokumen*	23.987.500
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	***Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi***	***Kab.Jombang***	***100%***	**616.568.000**	APBD		***100%***	**616.568.000**
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*	*Kab.Jombang*	*1 laporan*	77.298.000	APBD		*1 laporan*	77.298.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun*	*Kab.Jombang*	*2 dokumen*	67.670.000	APBD		*2 dokumen*	67.670.000
	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	*Kab.Jombang*	*150 dokumen*	471.600.000	APBD		*150 dokumen*	471.600.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	***Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi***	***Kab.Jombang***	***100%***	**18.549.727.000**	APBD		***100%***	**18.549.727.000**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	*Kab. Jombang*	*12 Dokumen*	16.510.467.000	APBD		*12 Dokumen*	16.510.467.000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	*Kab. Jombang*	*4 dokumen*	2.039.260.000	APBD		*4 dokumen*	2.039.260.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat dan dunia usaha yang berisi program / kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD tahun 2024 yang ditinjaklanjuti dengan menyusun kebijakan public baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya daya anggaran.

Keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 dan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun TA 2024 agar benar benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, semua perangkat daerah supaya membuat rencana kerja tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan RKPD tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun jarring aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip safe guarding yaitu ;trasparansi, akuntabilitas, partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding bila didukung oleh peran masyarakat luas untuk mengawasi pelaksanaannya sehingga terwujud pembangunan berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil maximal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahab berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

]Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2024, sehingga upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Sekretariat DPRD

.

Jombang, 10 Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

Drs. BAMBANG SRIYADI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 198903 1 007